

# THEOLOGY & TRANSFORMASI SOSIAL SPIRITUALITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yusak Tridarmanto<sup>1</sup>

## Abstract

This article argues that mechanism of decision making for the Javanese people in rural areas are still dominated mainly by a little group of leaders, without any participation of members of society at large. This happens because of some cultural barriers rooted in the principle of harmony and honor. Misuse of these two cultural heritages could lead local leaders exercising their leadership arbitrarily. In order to avoid this danger, local leaders need to equip themselves with certain spirituality; spirituality that can guard them from being authoritarian, on the one hand, and at the same time it can provoke members of society at large to actively participate in the decision making. Theologically and culturally, it is argued that “spirituality of pamomong” (spirituality of a servant) will suit this need.

**Kata-kata kunci:** pemberdayaan, spiritualitas, pamomong, hamba

## 1. Catatan Pengantar

Isitilah “pemberdayaan masyarakat” terlalu umum, perlu terlebih dahulu dibatasi fokusnya. Masyarakat yang menjadi perhatian dalam tulisan berikut adalah masyarakat Jawa pedesaan, bukan masyarakat kota. Alasan utamanya ialah karena sebagian besar warga masyarakat masih hidup dan berada di pedesaan yang kondisi hidupnya masih cukup memprihatinkan.<sup>2</sup> Sementara itu kata “pemberdayaan” mengindikasikan adanya upaya membuat segenap warga masyarakat berdayaguna dalam rangka menggapai kesejahteraan hidup mereka. Tentu ini meliputi aspek kehidupan yang luas, yang tidak mungkin dibahas semuanya dalam kesempatan ini. Yang terutama akan menjadi pusat perhatian dalam kesempatan ini ialah masalah mekanisme pengambilan keputusan di aras masyarakat Jawa pedesaan. Ini disebabkan karena dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mekanisme pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur penting, yang sekaligus menjadi salah satu indikator berfungsi tidaknya asas demokrasi di dalam kehidupan masyarakat Jawa pedesaan tersebut.

Berdasarkan semua itu maka secara berturut-turut akan didiskusikan perihal model pengambilan keputusan yang umumnya terjadi di dalam masyarakat Jawa pedesaan; adakah model tersebut sudah ideal ataukah perlu pemberdayaan lebih lanjut. Selanjutnya akan didiskusikan pula corak spiritualitas yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan suatu model pengambilan keputusan yang diidealkan, sebelum pada akhirnya ditutup dengan upaya implementasinya.

---

<sup>1</sup> Pdt. Yusak Tridarmanto, M.Th. adalah Dekan pada Fakultas Teologi UKDW, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Kondisi yang memprihatinkan seperti ini paling tidak dapat dilihat di dalam gambaran yang diberikan oleh Sunyoto Usman dalam bukunya berjudul : *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1998. Lihat utamanya halan 29-52.

## 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan tentunya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hidup bersama di tengah-tengah masyarakat dan peranan para pemimpin di dalamnya. Dalam rangka hidup bermasyarakat, warna komunal yang sering terwujud dalam perilaku hidup “gotong royong” masih menunjukkan warna yang sangat kental bagi masyarakat Jawa pedesaan. Perilaku hidup gotong royong ini terpatri kuat pada prinsip hidup rukun yang berakar pada pandangan kosmologi Jawa. Menurut paham ini diyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini merupakan manifestasi dari satu realita tunggal yang memiliki tata tertipnya sendiri, yakni alam semesta. Karena itu segala unsur yang ada di dalam alam semesta ini harus menyadari akan tempat dan fungsinya masing-masing untuk secara bersama-sama mewujudkan tata tertib alam tersebut. Demikian juga peranan pemimpin di tengah-tengah masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip hormat bagi segenap warga masyarakat umumnya maupun warga masyarakat terhadap para pemimpin mereka khususnya. Mereka yang patut dihormati secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yakni kedua orang tua sebagai yang dipercayai dekat dengan sumber kehidupan, orang-orang yang memiliki tanggung jawab utama menegakkan prinsip-prinsip hidup bijaksana seperti guru, alim ulama, dan sebagainya, serta para pemimpin masyarakat yang diyakini dekat dengan sumber-sumber kekuasaan.<sup>3</sup>

Tanpa menisbikan pentingnya prinsip hidup rukun, implementasi yang berlebihan dari prinsip ini bisa saja justru menjadi kendala tercapainya keputusan bersama yang betul-betul obyektif. Kendala utamanya terletak dalam hal bahwa perbedaan-perbedaan pendapat terpaksa harus diredam semata-mata demi menjaga kerukunan hidup bersama. Senada dengan ini, prinsip hormatpun juga dapat menjadi kendala dicapainya keputusan yang benar-benar obyektif manakala implementasinya menjadi berlebihan. Salah satu wujud sikap hormat adalah tidak memperlakukan di muka umum mereka yang berada dalam posisi pemimpin. Dalam hubungan ini dikembangkanlah sikap menempatkan para pemimpin tersebut sebagai “sesepuh”, “pepundhen” dan “pinisepuh”. Terkandung di dalam prinsip ini ialah sikap “nurut” terhadap apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan mereka.<sup>4</sup> Betapapun Ki Hadjar Dewantara mengembangkan pola kepemimpinan yang berpusat pada tiga prinsip dasar yakni “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tur Wuri Handayani”, namun dalam praktek sehari-harinya warga masyarakat Jawa banyak dipengarui pula oleh pegangan bahwa para pemimpin itu memiliki sifat “Sabda Pandita Ratu tan kena wola-wali”. Prinsip ini banyak disosialisasikan melalui kisah-kisah pewayangan yang masih sangat populer bagi masyarakat Jawa pedesaan dewasa ini. Melalui prinsip ini masyarakat Jawa pedesaan umumnya percaya bahwa seorang pemimpin harus konsekwen dan sanggup melaksanakan apa yang sudah diucapkannya. Karena itu seorang pemimpin tidak akan dengan gegabahnya membuat keputusan-keputusan dan dengan seenaknya sendiri membuat koreksi-koreksi atas keputusan tersebut.<sup>5</sup> Sikap inilah yang telah menimbulkan rasa percaya warga masyarakat kepada para pemimpin, sebab para pemimpin pasti akan membuat keputusan-keputusan yang benar-benar bijaksana, dan baik untuk kalangan masyarakat luas.

<sup>3</sup> Lihat Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat Di Jawa*, h.29.

<sup>4</sup> Niels Mulder “Ideologi Kepemimpinan Jawa” dalam G. Moedjanto (ed.), *Kepemimpinan Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) h.83-84.

<sup>5</sup> Sujamto, *Sabda Pandhita Ratu* (Semarang: Dahara Prize, 2001) h. 17-22.

Sekelumit pencandraan pola kehidupan masyarakat berkaitan dengan peranan para pemimpin di tengah-tengah kehidupan mereka seperti itu telah memberikan kesan bahwa masyarakat Jawa di pedesaan lebih banyak mempercayakan pengambilan-pengambilan keputusan kepada mereka yang dipercayai memegang kedudukan sebagai pemimpin. Keterlibatan masyarakat secara luas menjadi lemah kalau tidak boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Mekanisme pengambilan keputusan yang lebih dipercayakan kepada para pemimpin mereka itu tercermin melalui rapat-rapat pengambilan keputusan yang terjadi di masyarakat pedesaan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa pedesaan dewasa ini, pengambilan keputusan seperti ini umumnya terwujud dalam pertemuan-pertemuan warga se Rukun Tetangga ataupun pertemuan warga se Rukun Warga. Kekurang-terlibatan warga dalam mekanisme pengambilan keputusan melalui rapat-rapat tersebut pertama-tama nampak dalam hal bahwa rapat-rapat tersebut dihadiri hanya oleh warga desa laki-laki sebagai kepala keluarga, atau sebagai wakil kepala keluarga.

Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang masih sangat bersifat patriakhal, maka rapat-rapat tersebut hanya dihadiri oleh para laki-laki sebagai kepala keluarga atau yang mewakilinya. Dalam kondisi seperti itu tentu keputusan-keputusan yang dibuat tidak selalu dijamin telah mewakili aspirasi warga masyarakat perempuan. Bahkan tidak mustahil keputusan-keputusan yang dibuatnya justru merugikan kaum perempuan.<sup>6</sup> Di samping ketidak-hadiran kaum perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan, keterlibatan warga yang hadir dalam pertemuan tersebut juga cenderung terbatas. Keterbatasan ini sedikit banyak juga disebabkan oleh perasaan “tidak pada tempatnya” sebagai “orang kecil” menyampaikan pendapat-pendapatnya.<sup>7</sup> Ketika ada satu atau dua orang ikut memberikan pendapatnya, sering pendapat-pendapat tersebut tenggelam atau katakanlah terabaikan oleh munculnya pendapat dari mereka yang dipandang sebagai pemimpin baik formal maupun informal. Akibatnya ketika harus diambil keputusan, maka suara para pemimpin inilah yang kelak menjadi keputusan, yang oleh sebagian besar mereka yang hadir hanya di-“iya”-kan begitu saja.<sup>8</sup> Konsekuensi dari minimnya keterlibatan warga memberikan pendapat dalam rangka mengambil keputusan ini telah mengakibatkan munculnya dominasi pembicaraan oleh para pemimpin warga tersebut. Bahkan bisa terjadi bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan bersama warga masyarakat, telah dibuat sebelumnya oleh mereka yang ditempatkan sebagai pemimpin, yang pada gilirannya warga masyarakat hanyalah melegalisasikan keputusan yang telah dibuat tersebut tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>6</sup> Sebagai contoh, ketika diputuskan untuk melakukan kerjabakti sosial, ibu-ibu akan diserahi untuk bertanggungjawab masalah konsumsinya. Untuk itu para perempuan tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan keputusan tersebut betapapun sebenarnya banyak kaum ibu yang tidak bisa melaksanakan-nya karena alasan-alasan tertentu.

<sup>7</sup> Sesuai dengan faham kosmologi Jawa, setiap orang akan dididik untuk mengetahui tempat dan fungsinya di dalam alam semesta ini. Setiap orang akan selalu berusaha bertindak secara tepat sesuai dengan tempat dan fungsinya di dalam masyarakat. Ketika orang Jawa merasa bukan pada tempatnya untuk mengajukan pendapat, maka ia tidak pernah akan mengemukakan pendapatnya. Perasaan tidak pada tempatnya inilah yang sering menjadi kendala dalam keterlibatan untuk berpendapat.

<sup>8</sup> Fenomen ini lebih merupakan pengalaman pribadi terlibat di dalam kehidupan masyarakat desa tertentu, belum merupakan hasil penelitian yang sah.

Sikap sebagian besar warga yang demikian itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka yang umumnya sangat minim. Dengan latar belakang pendidikan yang minim inilah mereka merasa “tidak pada tempatnya” untuk ikut memberikan sumbang saran. Manakala para pemimpin warga benar-benar menempatkan fungsinya sebagai pemimpin yang dapat ngayomi warga masyarakatnya dan demi kesejahteraan warganya, maka selama itu pula keputusan-keputusan yang dibuatnya tentunya tidak akan merugikan rakyat banyak. Namun ketika para pemimpin tersebut telah kehilangan orientasi kepemimpinannya, dan sebaliknya melaksanakan fungsi kepemimpinannya semata-mata untuk ke- “jayaan” dirinya sendiri, maka kondisi warga yang demikian itu tentu akan mudah sekali dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan para pemimpin tersebut. Upaya-upaya manipulasi seperti ini nampak terutama pada masa-masa pemilihan Kepala Desa. Akibatnya warga masyarakat tidak lagi menjadi subyek yang ikut menentukan arah kebijaksanaan demi kesejahteraan mereka, namun semata-mata menjadi obyek bagi kesejahteraan sekelompok warga masyarakat yang memiliki posisi dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, jelas bahwa apa yang umumnya dimengerti dengan demokrasi, tidak pernah akan menjadi kenyataan. Kondisi masyarakat yang demikian itulah yang masih perlu untuk diberdayakan, agar melalui pemberdayaan itu, mereka benar-benar dapat terlibat aktif dalam menentukan dan merancang masa depan mereka yang adil dan sejahtera.

### 3. Spiritualitas Pemberdayaan Macam Apa

Istilah “spiritualitas” merupakan pembendaan kata sifat spiritual. Kata dasarnya ialah “spirit” yang bisa diartikan dengan: jiwa, roh, sukma, budi dan lain sebagainya. Kata sifat spiritual berarti jiwani, rohani, sukma dan sebagainya. Kata bendanya berarti kerohanian, kejiwaan, kesukmawian dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata benda *pneuma*, dengan kata sifatnya *pneumatikos*. Kata *pneuma* pertama-tama berarti angin, udara yang bergerak, nafas, roh. Kalau kata spirit dimaknai dengan angin, ide utamanya ialah bahwa spirit itu berkaitan dengan ***kekuatan yang hidup***, yang mampu memberikan daya gerak dinamis, dan karenanya tidak salah kalau kata spirit itu juga berarti nafas kehidupan.<sup>9</sup> Dari pengertian ini maka kata benda spiritualitas bisa dimengerti sebagai ***daya gerak kehidupan yang terpancar dari dasar kehidupan manusia untuk menjalani hidup sehari-hari***. Dalam arti yang demikian, maka sikap hidup rukun dan hormat yang ikut mempengaruhi warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti terurai di atas pada dasarnya merupakan spiritualitas tersendiri, yakni spiritualitas masyarakat Jawa. Namun seiring dengan perjalanan waktu, ketika corak spiritualitas seperti itu dirasa perlu dikritisi dalam rangka ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, maka tidak salah manakala diupayakan corak spiritualitas lain yang dirasa lebih pas.

Secara teologis, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesetaraan satu dengan yang lain di hadapan Sang Khalik. Ini nyata dalam hal mereka sebagai satu kesatuan disebut dengan sebutan **Adam (אדם)**<sup>10</sup>. Kesetaraan ini sekaligus menunjukkan bahwa masing-masing pribadi memiliki otonominya sendiri dalam mengelola kehidupannya, tidak ada satupun yang ditempatkan sebagai yang

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan kitab Kejadian 2: 7.

<sup>10</sup> Baca Kejadian 1: 26

dikuasai ataupun yang menguasai.<sup>11</sup> Kalaupun untuk kepentingan pengorganisasian hidup bersama diperlukan koordinator-koordinator ataupun pemimpin-pemimpin, itu semua terjadi karena ada kerelaan dari masing-masing individu untuk menyerahkan wewenang tertentu kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya untuk melaksanakan fungsi kepemimpinannya, sehingga dengan demikian kehidupan bersama itu dapat diwujudkan. Walaupun demikian penyerahan kepercayaan untuk memimpin ini tidak berarti bahwa setiap individu harus kehilangan hak dan kebebasannya untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena itu penyerahan kewenangan ini sekaligus mengandung di dalam dirinya fungsi kontrol. Dengan fungsi ini setiap pribadi melakukan kontrol apakah kepercayaan yang diserahkan kepada para pemimpin itu masih berjalan dengan baik seiring dengan tujuan hidup bersama atau tidak. Dengan demikian penyerahan kewenangan ini tidak seharusnya meniadakan keterlibatan setiap pribadi dalam proses pengambilan keputusan untuk hidup bersama. Dalam arti yang demikian maka yang disebut pemimpin sebenarnya bukanlah “penguasa” dengan kekuasaan yang mutlak, yang dapat menjalankan fungsi kekuasaan-nya secara sesuka hati, untuk kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya mereka adalah orang-orang yang dipercayai untuk secara khusus mengatur dan memikirkan strategi-strategi kehidupan untuk kebahagiaan mereka yang telah memberikan kepercayaan tersebut. Dengan demikian para pemimpin ini melaksanakan fungsi kepemimpinannya pertama-tama bukan untuk sukacita dirinya sendiri, melainkan untuk sukacita mereka yang dipimpinnya. Sedangkan sukacita para pemimpin tidak ada lain kecuali kalau mereka yang dipimpinnya itu bersukacita.

Secara teologis, pola kepemimpinan seperti ini lebih cocok disebut dengan pola kepemimpinan yang menghamba, yang citra idealnya dapat ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Dalam rangka menjalankan misi-Nya sebagai yang diutus oleh Allah, Tuhan Yesus berkata: “... **Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani** dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mat. 20: 28, band. Mark. 10: 45). Kata kerja “melayani” diterjemahkan dari kata Yunani “*diakoneō*” dengan kata bendanya “*diakonos*”. Secara khas rumpun kata ini dipakai untuk menunjuk kepada fungsi seorang hamba atau pelayan yang melayani di meja perjamuan makan. Tekanannya ialah kepada kerendahan hati dan kesetiaan untuk melakukan tugas pelayanan demi kesejahteraan orang-orang yang dilayani.<sup>12</sup> Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang sangat mengagung-agungkan kuasa dan jabatan sebagai tanda kebesaran ketika itu,<sup>13</sup> dan di tengah-tengah kecenderungan hidup untuk dilayani dan bukan untuk melayani<sup>14</sup> maka

---

<sup>11</sup> Perhatikan perkataan kain ketika ditanya oleh Tuhan “di mana Habel adikmu”, jawabnya: “Aku tidak tahu! Akukah enjaga adikku? (Kej. 4: 9).

<sup>12</sup> Lihat dan bandingkan dengan R.T. Beckwith, “Minister, Ministry”, *The Illustrated Bible Dictionary* (Ed. by J.D. Douglas, England: Inter-Varsity Press, 1980) hal. 006-1009. Lihat juga J. Perschbacher (Ed.), *The New Analytical Greek Lexicon* (Massachusetts: Hendrickson Publisher, 1990) hal. 92-93.

<sup>13</sup> Dalam situasi demikian, hamba dan pelayan sangat dihina dan mendapatkan perlakuan serta sikap kurang baik dari orang-orang Yahudi pada umumnya maupun juga orang-orang Yunani. Contoh untuk sikap negatif seperti ini dapat dilihat di dalam perkataan Bin Sirach 33: 26-28. Dikatakan di sini: “Suruhlah budakmu bekerja, maka kau dapat istirahat; kalau tangannya kaubiarkan bermalas, niscaya ia mencari kemerdekaan. Kuk dan kekang membungkukkan tengkuk, dan aniaya dan siksa adalah serasi dengan hamba yang jahat. Bebaskanlah pekerjaan kepada budakmu, sehingga ia tidak menganggur, sebab pengangguran mengajar banyak kejahatan”.

<sup>14</sup> Kecenderungan untuk hidup dilayani dan bukan melayani merupakan fenomena umum kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana Yesus hidup dan berkarya ketika itu. Lihat R.W. Paschal, Jr, “Service”, *Dictionary of Jesus and the Gospels* (ed. by Jiel B Green, Scot Mcknight, I Howard Marshal, England: Inter-Varsity Press, 1992) hal. 747-748.

sebaliknya Tuhan Yesus justru menawarkan *sikap hidup menghamba* bagi kesejahteraan orang banyak, dan hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apa yang Ia sebut dengan kebesaran atau keagungan tidak terletak pada kuasa dan jabatan yang dimiliki seseorang, tetapi sebaliknya terletak pada *adanya semangat dan jiwa hidup menghamba*. Karena itulah Ia memperingatkan para murid-Nya bahwa barangsiapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan (*diakonos*, Mark. 10:43) bagi sesamanya. Ini menandakan bahwa *“melayani” bukanlah soal kuasa dan jabatan, melainkan soal kerelaan hati untuk dengan rendah hati bekerja demi menyejahterakan pihak lain.*

Dalam terang pemikiran teologis seperti itu, maka dengan mengambil latar belakang budaya Jawa, model kepemimpinan yang patut diperjuangkan di tengah-tengah masyarakat Jawa adalah model kepemimpinan sebagai “pamomong”<sup>15</sup>. Dalam budaya Jawa, seorang pamomong menunjuk kepada seorang ibu yang menjagai seorang anak yang sedang bermain. Kepada anak tersebut diberikan kebebasan bermain apa saja sejauh dipandang tidak membahayakan jiwanya. Dengan pola ini maka anak yang sedang “*diemong*” tersebut tetap memiliki dunia kehidupannya sendiri, namun tetap terawasi kalau-kalau ada bahaya yang mengancam jiwanya. Dalam hubungan ini sang pamomong seringkali memberikan rangsangan-rangsangan tertentu kepada anak yang sedang “*diemong*”, dengan tujuan agar anak tersebut semakin mencintai dunia kehidupannya.<sup>16</sup> Dengan kata lain tugas pamomong adalah memberikan rangsangan-rangsangan tertentu bagi anak untuk secara lebih kreatif mencintai dunianya dan dengan demikian memperoleh sukacitanya. Kalau demikian model kepemimpinan seperti ini bukanlah model kepemimpinan yang otoriter, melainkan model kepemimpinan yang partisipatif sifatnya. Bukan model kepemimpinan yang bersifat top-down, tetapi justru yang bersifat bottom-up. Dengan model kepemimpinan seperti itu maka pemimpin maupun yang dipimpin ikut bermain bersama, dan bahkan saling memberi dan mendorong.

Dengan prinsip itu memang tidak berarti bahwa prinsip rukun dan hormat seperti telah disinggung di atas menjadi tidak relevan dan dengan demikian harus disingkirkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Prinsip tersebut tetap memegang peranan yang penting. Bagaimanapun kerukunan dan hormat menjadi pilar kehidupan bersama masyarakat, apapun jenis masyarakatnya. Yang harus dijaga ialah agar prinsip ini tidak mengakibatkan dikebirinya hak dan kebebasan setiap pribadi untuk ikut memikirkan dan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya melalui keterlibatan mereka dalam setiap pengambilan keputusan.

#### 4. Implementasinya

Kalau mekanisme pengambilan keputusan di masyarakat pedesaan terjadi utamanya dalam lingkup rapat RT dan RW, maka pertama-tama yang harus mulai dipikirkan ialah bagaimana melibatkan kaum perempuan di dalamnya. Ini bisa terjadi manakala kehadiran di dalam rapat tersebut tidak didasarkan pada sistem perwakilan, yang umumnya diwakili oleh kepala keluarga (yang selalu laki-laki), melainkan kehadiran berdasarkan tingkat kedewasaan seseorang. Setiap orang dewasa, entah

---

<sup>15</sup> Dari kata “momong” = menjagai anak untuk kesejahteraannya.

<sup>16</sup> Dalam kisah pewayangan yang disebut dengan sebutan pamomong adalah Semar. Dialah pamomong untuk para ksatria yang menegakkan kebenaran.

laki-laki ataupun perempuan, wajib diundang untuk hadir dalam rapat RT ataupun R.W.

Mengingat umumnya warga masyarakat pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang minimal, maka untuk mendorong warga ambil bagian secara aktif dalam memberikan sumbangan pendapat dan pengambilan keputusan, maka perlu adanya pendidikan warga masyarakat, utamanya pendidikan dalam hal berorganisasi. Di sinilah fungsi para pemimpin sebagai “pamomong” dapat diwujudkan-nyatakan, yakni bagaimana para pemimpin mendidik dan mempersiapkan warganya untuk menjadi dewasa dalam hal hidup berorganisasi. Fungsi ini dapat dilaksanakan apabila para pemimpin benar-benar menjalankan jiwa “pamomongnya”. Untuk itu semua tentu dibutuhkan proses yang panjang. Kesetiaan terhadap proses yang panjang ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya upaya pemberdayaan tersebut.